# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum

1. **Kondisi Geografi**

Jawa Tengah merupakan provinsi yang strategis secara geografi, astronomi maupun geologi. Secara geografi, Provinsi Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi serta dibatasi oleh laut dan samudra. Batas yang mengapit Jawa Tengah adalah Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Indonesia di sebelah selatan.

Kondisi topografi wilayah Provinsi Jawa Tengah beranekaragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai utara dan selatan. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Luas Provinsi Jawa Tengah 32.800,69 km² atau lebih dari seperempat luas wilayah Pulau Jawa. Wilayah dataran terletak pada ketinggian 0-99 mdpl seluas 53,3%. Wilayah lereng bukit yang landai 100-499 mdpl seluas 27,40%, dan wilayah pegunungan lereng bukit. 500-999 mdpl seluas 14,70%. dan wilayah pegunungan yang curam ≥ 1 000 mdpl seluas 4,60%.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, atau terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, dengan Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah terluas yang ada di Jawa Tengah dengan luas 2.124,47 km², sedangkan Kota Magelang yaitu wilayah terkecil dengan luas 16,06 km2.

1. **Kondisi Iklim**

Secara geografi, Provinsi Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda (*ring of fire*) dunia sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif. Karena sifatnya yang aktif dan kerap mengancam keselamatan manusia sekitarnya. Namun, di sisi lain gunung api membuat tanah menjadi subur dari endapan vulkanik. Endapan vulkanik ada sebagai dampak dari banyaknya gunung api aktif di Jawa Tengah.

Secara astronomi, Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40' - 8°30' LS dan 108°30' - 111°30′ BT. Posisi ini berdampak pada iklim, suhu udara,kelembaban, hari hujan, curah hujan, lama penyinaran matahari, tekanan udara dan kecepatan angin.

Suhu udara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Suhu udara berkisar antara 22,0°C-35,2°C, meningkat dibandingkan tahun lalu yang suhu tertinggi di angka 33,6°C. Kelembapan udara memiliki rentang yang lebih sempit dibandingkan tahun 2021. Rata-rata kelembaban udara tahun 2022 berkisar antara 74-86%, sementara tahun 2021 lalu berkisar antara 57–96%.

1. **Kondisi Pemerintahan**

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Pada tingkatan yang lebih rendah, terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kabupaten Banyumas tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak dengan 27 kecamatan sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak tercatat di Kabupaten Purworejo dengan 494 desa/kelurahan.

Pada tahun 2022, jumlah PNS di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 3,28% antara lain karena masa pensiun. Penurunan jumlah PNS dialami oleh PNS laki-laki dengan penurunan sebesar 7,13%, sedangkan PNS perempuan menurun sebesar 1,98%.

Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Total pendapatan daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022 yang turun 9,26%. Komponen pendapatan asli daerah menempati porsi terbesar (rata-rata 57,53%) dibandingkan dana perimbangan (rata-rata 42,16%) dan dana dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah (rata-rata 0,31%). Komposisi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah semakin menurun sejak 2018-2021, namun meningkat di 2022. Hal ini menjadi indikasi membaiknya kemandirian daerah dan menurunnya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Komposisi belanja tidak langsung mempunyai porsi besar yaitu 68,60% pada tahun 2021. Sedangkan belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan program kegiatan. Porsi belanja langsung mempunyai porsi 31,40% pada struktur belanja daerah.

1. **Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebanyak 37,49 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25,99 juta jiwa (69,34%) penduduk di provinsi ini adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun). Terdapat pula 11,5 juta jiwa (30,66%) penduduk Jawa Tengah yang masuk kelompok usia tidak produktif. Rinciannya, ada 8,48 juta jiwa (22,62%) yang masuk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan terdapat pula 3,02 juta jiwa (8,05%) masuk kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Dengan data jumlah penduduk tersebut, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Jawa Tengah sebesar 44,23% pada tahun 2022. Artinya, setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung 44-45 jiwa penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Jawa tengah yang berjenis kelamin laki-laki ada 18,86 juta jiwa dan terdapat pula 18,63 juta jiwa perempuan.

Mayoritas penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga terdapat banyak orang beretnis Sunda. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolasi. Selain itu, di beberapa daerah di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia.

Bahasa resmi di Provinsi Jawa Tengah adalah Indonesia, dengan bahasa sehari-hari adalah Jawa dan Sunda. Mayoritas penduduk beragama Islam, terbagi dalam golongan Santri dan Abangan. Sementara agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan aliran kepercayaan. Jawa Tengah juga merupakan pusat penyebaran Kristen dan Katolik di Pulau Jawa.

1. **Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,31 persen (2021 = 3,33 persen). Dari sisi produksi, kontraksi hanya terjadi pada satu lapangan usaha yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, dengan kontraksi sebesar -6,20 persen, dengan peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 2,42 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 3,80 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,93 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,88 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga merupakan sektor dominan bagi perekonomian Jawa Tengah berkontribusi sebesar 13,59 persen, tumbuh sebesar 4,32 persen pada tahun 2022.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga. Menurut harga berlaku, tahun 2022 konsumsi rumahtangga mempunyai konstribusi sebesar 60,28 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah atau senilai 940,91 triliun rupiah. Jika didasarkan harga konstan tahun 2010 nilainya mencapai 616,68 triliun rupiah, naik sebesar 5,52 persen pada tahun 2022.

Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga berlaku, tahun 2022 mencapai 479,06 triliun rupiah, dan sebesar 302,83 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2010. PMTB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 1,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang diolah melalui program SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *gross regional domestic product*, pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi serta belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah proses mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan pola dari data tersebut (Ghozali, 2018). Analisis statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

|  |
| --- |
| ***Descriptive Statistics*** |
|  | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
| GRDP | 175 | 29,74 | 33,06 | 31,0915 | ,61633 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 175 | -,10 | ,07 | ,0357 | ,03050 |
| Laba BUMD | 175 | 21,98 | 25,10 | 23,5372 | ,51546 |
| Inflasi | 175 | ,01 | ,07 | ,0368 | ,01463 |
| Belanja Daerah | 175 | 27,41 | 29,21 | 28,3853 | ,34462 |
| Pendapatan Asli Daerah | 175 | 25,91 | 28,57 | 26,6677 | ,40980 |
| Valid N (listwise) | 175 |  |  |  |  |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* analisis statistik desktiptif pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 175. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan asli daerah mempunyai nilai minimum sebesar 25,91 atau sama dengan Rp179.224.408.698 diperoleh dari Kota Pekalongan pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 28,57 atau sama dengan Rp2.545.991.747.658 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2022. Dalam variabel pendapatan asli daerah didapatkan nilai rata-rata sebesar 26,6677 dan nilai standar deviasi sebesar 0,43458, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. *Gross Regional Domestic Product*

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah *gross regional domestic product* mempunyai nilai minimum sebesar 29,74 atau sama dengan Rp8.201.330.000.000 diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 33,06 atau sama dengan Rp227.619.170.000.000 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2022. Dalam variabel *gross regional domestic product* didapatkan nilai rata-rata sebesar 31,0915 atau sama dengan Rp39.755.927.542.857 dan nilai standar deviasi sebesar 0,61633, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlahpertumbuhan ekonomi mempunyai nilai minimum sebesar -0,10 diperoleh dari Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,07 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2019. Dalam variabel pertumbuhan ekonomi didapatkan nilai rata-rata sebesar 0,0357 dan nilai standar deviasi sebesar 0,03050, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. Laba BUMD

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah laba BUMD mempunyai nilai minimum sebesar 21,98 atau sama dengan Rp3.530.831.162 diperoleh dari Kota Tegal pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 25,10 atau sama dengan Rp79.651.157.568 diperoleh dari Kabupaten Blora pada tahun 2020. Dalam variabel laba BUMD didapatkan nilai rata-rata sebesar 23,5372 atau sama dengan Rp19.268.854.472 dan nilai standar deviasi sebesar 0,51546, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. Inflasi

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah inflasi mempunyai nilai minimum sebesar 0,01 diperoleh dari Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,07 diperoleh dari Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, kota Pekalongan, Kota Surakarta pada tahun 2022. Dalam variabel inflasi didapatkan nilai rata-rata sebesar 0,0368 dan nilai standar deviasi sebesar 0,01463, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. Belanja Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah belanja daerah mempunyai nilai minimum sebesar 27,41 atau sama dengan Rp798.353.191.714 diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 29,21 atau sama dengan Rp4.871.946.697.040 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2022. Dalam variabel belanja daerah didapatkan nilai rata-rata sebesar 28,3853 atau sama dengan Rp2.243.652.710.373 dan nilai standar deviasi sebesar 0,34462, dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data terdistribusi normal.

1. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang diperoleh benar-benar terbebas dari adanya normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi atau variabel-variabel independen dan dependen memiliki distribusi data yang normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dalam menguji normalitas data. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika *Asymp.Sig.* > 0,05 maka data distribusi normal, namun jika nilai *Asymp.Sig.* < 0,05 data tidak berdistribusi dengan normal (Ghozali, 2018). Adapun hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2

Hasil Uji Normalitas

|  |
| --- |
| ***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 175 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | ,24102319 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,055 |
| Positive | ,055 |
| Negative | -,049 |
| Test Statistic | ,055 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,200c,d |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji normalitas pada tabel 4.2 dengan menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi normal, dikarenakan *Asymp.Sig*. (2-*tailed*) lebih besar dari signifikan 0,05 atau 0,200 > 0,05. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

1. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi variabel-variabel independen diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam model regresi. Kedua ukuran ini menunjukkan sejauh mana satu variabel independen bergantung pada yang lain. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai *Tolerance* > 0,10 berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, akan tetapi jika nilai *Tolerance* < 0,10 maka terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan jika nilai VIF < 10,00 berarti tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, tetapi jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Hasil Uji Multikolinearitas

|  |
| --- |
| ***Coefficients*** |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| GRDP | ,372 | 2,689 |
| Pertumbuhan Ekonomi | ,917 | 1,091 |
| Laba BUMD | ,740 | 1,351 |
| Inflasi | ,859 | 1,164 |
| Belanja Daerah | ,357 | 2,804 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji multikolinearitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa data dari penelitian ini tidak tejadi multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model persamaan regresi yaitu dengan melihat nilai VIF dan nilai *Tolerance* sebagai berikut:

1. Variabel GRDP memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,372 > 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar 2,689 < 10,00.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,917 > 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar 1,091 < 10,00.
3. Variabel laba BUMD memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,740 > 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar 1,351 < 10,00.
4. Variabel Inflasi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,859 > 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar 1,164 < 10,00.
5. Variabel belanja daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,357 > 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar 2,804 < 10,00.
6. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada model regresi linear di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode t-1 atau periode sebelumnya. Model regresi dapat dikatakan baik apabila regresi bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin Watson untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu dan ruang dalam model regresi linier. Jika DW statistik berada diantara du < d < 4 – du, maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Hasil Uji Autokerelasi

|  |
| --- |
| ***Model Summary*** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,803a | ,645 | ,634 | ,16828 | 2,001 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji autokorelasi pada tabel 4.4 dengan menggunakan uji Durbin Watson diperoleh nilai DW statistik sebesar 2,001. Jumlah data (N) ada 175 dan jumlah variabel independen (K) ada 5, maka dari tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,8117 dan batas bawah (dL) 1,6943 dilakukan dengan tingkat pengujian du < d < 4 – du, sehingga diperoleh 1,8117 < 2,001 < 2,1883, maka dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

1. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser yaitu untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen atau fungsi dari variabel independen. Jika dalam uji Glejser nilai signifikansi > 0,05, maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

|  |
| --- |
| ***Coefficients*** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -,093 | ,074 |  | -1,264 | ,209 |
| GRDP | ,138 | ,082 | ,261 | 1,692 | ,094 |
| Pertumbuhan Ekonomi | ,001 | ,002 | ,063 | ,650 | ,517 |
| Laba BUMD | -,041 | ,032 | -,132 | -1,282 | ,203 |
| Inflasi | ,001 | ,001 | ,088 | ,906 | ,367 |
| Belanja Daerah | ,003 | ,123 | ,004 | ,026 | ,980 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 dengan menggunakan uji glejser, dapat diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel independen dalam model persamaan regresi ini yaitu variabel GRDP (X1) sebesar 0,094, variabel pertumbuhan ekonomi (X2) sebesar 0,517, variabel laba BUMD (X3) sebesar 0,203, variabel inflasi (X4) sebesar 0,367, serta variabel belanja daerah (X5) sebesar 0,980. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda betujuan untuk mendeteksi pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yakni pengaruh *gross regional domestic product,* pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, serta belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis regresi berganda dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y=α+β\_{1}X\_{1}+β\_{2}X\_{2}+β\_{3}X\_{3}+β\_{4}X\_{4}+β\_{5}X\_{5}+e$$

Tabel 4. 6

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

|  |
| --- |
| ***Coefficients*** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | ,379 | ,580 |  | ,654 | ,514 |
| GRDP | ,374 | ,059 | ,478 | 6,335 | ,000 |
| Pertumbuhan Ekonomi | ,363 | ,357 | ,049 | 1,016 | ,311 |
| Laba BUMD | ,097 | ,038 | ,137 | 2,567 | ,011 |
| Inflasi | -,211 | ,735 | -,014 | -,287 | ,774 |
| Belanja Daerah | ,406 | ,106 | ,296 | 3,839 | ,000 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* analisis regresi linier berganda pada tabel 4.6 dengan memperhatikan koefisien masing-masing variabel, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=0,379+0,374X\_{1}+0,363X\_{2}+0,097X\_{3}-0,211X\_{4}+0,406X\_{5}+e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda pada tabel diatas dapat diambil suatu analisis bahwa:

1. Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,379. Apabila variabel *gross regional domestic product,* pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, serta belanja daerah bernilai 0, maka nilai pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,379.
2. Nilai koefisien regresi variabel *gross regional domestic product* sebesar 0,374. Apabila terjadi kenaikan pada variabel *gross regional domestic product*, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,374. Hasil koefisien regresi bernilai positif, berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *gross regional domestic product* dengan pendapatan asli daerah.
3. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,363. Apabila terjadi kenaikan pada variabel pertumbuhan ekonomi, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,363. Hasil koefisien regresi bernilai positif, berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah.
4. Nilai koefisien regresi variabel laba BUMD sebesar 0,097. Apabila terjadi kenaikan laba BUMD, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,097. Hasil koefisien regresi bernilai positif, berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah antara laba BUMD dengan pendapatan asli daerah.
5. Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar -0,211. Apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,211, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,211. Hasil koefisien regresi bernilai negatif, berarti menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara inflasi dengan pendapatan asli daerah.
6. Nilai koefisien regresi variabel belanja daerah sebesar 0,406. Apabila terjadi kenaikan belanja daerah, maka akan menaikkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,406. Hasil koefisien regresi bernilai positif, berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah.
7. **Uji Hipotesis**

Uji hipotesis digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengevaluasi nilai aktual dapat diukur dari uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

1. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan ketentuan pengambilan keputusan pengujian uji F adalah jika nilai signifikan < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model persamaan regresi penelitian ini layak digunakan (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan rumus (k; n-k), maka menghasilkan angka (5; 170). Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Hasil Uji F (Uji Kelayakan Model)

|  |
| --- |
| **ANOVA** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 8,644 | 5 | 1,729 | 61,050 | ,000b |
| Residual | 4,757 | 168 | ,028 |  |  |
| Total | 13,401 | 173 |  |  |  |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji F pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0.05. Selain itu, diketahui nilai Fhitung sebesar 61,050 sedangkan Ftabel sebesar 2,27. Hal ini menunjukkan nilai Fhitung 61,050 > Ftabel 2,27 maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kelayakan model ini diterima dan model regresi layak digunakan dalam penelitian.

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikan 0,05. Hasil yang diperoleh jika nilai signifikan < 0,05 atau thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Penelitian ini dilakukan dengan pengujian dua sisi menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka menghasilkan ttabel (α/2; n-k-1) = (0,025;175-5-1) = (0,025; 169) = 1,97410. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Hasil Uji t (Uji Parsial)

|  |
| --- |
| ***Coefficients*** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | ,379 | ,580 |  | ,654 | ,514 |
| GRDP | ,374 | ,059 | ,478 | 6,335 | ,000 |
| Pertumbuhan Ekonomi | ,363 | ,357 | ,049 | 1,016 | ,311 |
| Laba BUMD | ,097 | ,038 | ,137 | 2,567 | ,011 |
| Inflasi | -,211 | ,735 | -,014 | -,287 | ,774 |
| Belanja Daerah | ,406 | ,106 | ,296 | 3,839 | ,000 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil *output* uji t pada tabel 4.8 dapat dijelaskan keterkaitan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel GRDP memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 6,335 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara GRDP dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa **H1 diterima.**
2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai Sig. 0,311 > 0,05 dan nilai thitung 1,016 < ttabel 1,97410. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa **H2 ditolak**.
3. Variabel laba BUMD memiliki nilai Sig. 0,011 < 0,05 dan nilai thitung 2,567 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara laba BUMD dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa **H3 diterima**.
4. Variabel inflasi memiliki nilai Sig. 0,774 > 0,05 dan nilai thitung 0,287 < ttabel 1,97410. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa **H4 ditolak**.
5. Variabel belanja daerah memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 3,839 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa **H5 diterima**.
6. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan dalam pengukuran baik tidaknya kualitas kemampuan dalam persamaan model dengan memperoleh nilai yang memperlihatkan korelasi antar variabel independen pada variabel dependen. Ketika nilai (R²) mendekati satu, hal tersebut menandakan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, jika nilai (R2) rendah, menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini mengacu pada nilai *Adjusted R-Squared*, yang dapat berubah jika ada penambahan variabel independen dalam model (Ghozali, 2018). Adapun hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

|  |
| --- |
| ***Model Summary*** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,803a | ,645 | ,634 | ,16828 | 2,001 |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS V22, 2024

Berdasarkan hasil output uji koefisien determinasi (R2) pada tabel 4.9 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,634. Hal ini menunjukkan besarnya kekuatan variabel independen dalam penelitian untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 63.4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel *gross regional domestic product*, pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi serta belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 63,4%. Sedangkan sisanya 36,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari serangkaian uji dan analisis hipotesis yang diolah melalui program SPSS, maka disajikan sebagai berikut:

1. **Pengaruh *Gross Regional Domestic Product* Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji t pada variabel *gross regional domestic product* memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 6,335 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara GRDP dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa H1 diterima.

*Gross Regional Domestic Product* (GRDP) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah dikarenakan tingginya aktivitas ekonomi di sektor industri. Aktivitas industri yang tinggi di Jawa Tengah didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kebijakan pemerintah yang proaktif, seperti pemberian insentif, pembangunan infrastruktur, dan menyelenggarakan program pelatihan tenaga kerja menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di Jawa Tengah (Satya, 2019). Kedua, keberadaan kawasan industri strategis seperti Kawasan Industri Semarang, Batang, Kendal, dan Brebes memberikan fasilitas dan insentif yang menarik bagi investor, sehingga keberadaan infrastruktur dan fasilitas ini mendorong pertumbuhan sektor industri serta meningkatkan produksi (Munir, 2015). Ketiga, kekayaan sumber daya alam Jawa Tengah seperti hasil pertanian, perikanan, dan bahan tambang memberikan bahan baku utama bagi industri pengolahan, sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri (Surya, 2013). Keempat, Populasi yang besar di Jawa Tengah menyediakan pasar tenaga kerja yang luas, sementara upah tenaga kerja yang relatif rendah memperkuat daya tarik bagi industri padat karya (Kurniati, 2019).

GRDP yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi dari berbagai sektor ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Juliansyah dan Sulkadria, 2018). Pemerintah daerah dengan GRDP tinggi cenderung menarik investasi, dengan meningkatkan penerimaan dari izin dan pajak terkait investasi serta pembangunan infrastruktur yang berdampak positif pada pendapatan asli daerah (Luh dkk., 2021). Selain itu, GRDP yang tinggi menunjukkan perkembangan sektor ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat, hal tersebut akan meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah (Yunita dkk., 2018).

Hubungan ini selaras dengan teori *stakeholder*, dimana pihak-pihak berkepentingan terhadap sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk mengontrol atau memengaruhi keputusan terkait penggunaan sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, perusahaan dapat membuat kebijakan yang tepat terkait besarnya nilai tambah yang akan ditambahkan pada setiap produk, ketika nilai yang ditambahkan lebih besar maka pajak yang ditarik lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini akan menguntungkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat daerah yang akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk infrastruktur, layanan publik, dan program-program kesejahteraan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018), Luh dkk. (2021), Ariyani dkk. (2018), Priyono dan Handayani (2021), Hendri Saldi dkk. (2021), Weley dkk. (2019), Ernita (2021) serta Iman dkk. (2019) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai Sig. 0,311 > 0,05 dan nilai thitung 1,016 < ttabel 1,97410. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa H2 ditolak.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi ini relatif cepat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga menimbulkan kesenjangan antara daerah maju dengan daerah berkembang. Beberapa kabupaten/kota di wilayah metropolitan seperti Semarang dan Surakarta memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi (Raharja dan Lestari Unik, 2022). Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki struktur ekonomi yang dominan pada sektor pertanian, sehingga pendapatan asli daerah masih tergantung pada harga komoditas pertanian yang fluktuatif. Struktur ekonomi sektor pertanian membuat pendapatan asli daerah rentan terhadap perubahan kondisi cuaca dan harga bahan baku, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Astrini, 2013).

Hubungan ini tidak selaras dengan teori *stakeholder*, dimana pihak-pihak yang berkepentingan memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dalam pengaruh ini, teori *stakeholder* dapat membantu pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dalam merencanakan dan mengelola pertumbuhan ekonomi, sehingga hasilnya dapat lebih merata dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suot dkk. (2021), Hasanur dan Putra (2017), serta Kartika dan Drajad (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji t pada variabel laba BUMD memiliki nilai Sig. 0,011 < 0,05 dan nilai thitung 2,567 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara laba BUMD dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa H3 diterima.

Pada provinsi Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten dan kota. Salah satu contoh BUMD yang berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah adalah PT. Bank Jateng. Sebagai salah satu bank yang memiliki kantor cabang dan anak perusahaan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng telah menjadi bagian penting dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan daerah. Melalui laba yang diperoleh dari operasionalnya, Bank Jateng telah menyumbangkan sebagian besar bagian labanya kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pajak dan kontribusi lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Dona dkk., 2022). Selain itu, perusahaan lainnya seperti bagian laba BPR-BKK, bagian laba PDAB Slawi (Tirta Utama), dan dividen PT. Asuransi Bangun Askrida juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui bagian laba dan deviden yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, BUMD di Provinsi Jawa Tengah telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dita dan Yuhertiana, 2023).

Hubungan ini selaras dengan teori *stakeholder*, dimana pihak-pihak berkepentingan terhadap organisasi dapat mengendalikan atau mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemakai sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Dengan adanya para pemangku kepentingan diharapkan dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangan daerah agar optimal sesuai dengan sumber daya yang ada di daerahnya. Dengan demikian, jika BUMD mampu meningkatkan laba melalui kegiatan usaha yang efektif, maka pemerintah daerah dapat mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat dan pelaku bisnis juga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dona dkk. (2022), Dita dan Yuhertiana (2023), Nisa Vera (2020), Listyowati (2023) serta Yuniarti dkk. (2023) menyatakan bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji t pada variabel inflasi memiliki nilai Sig. 0,774 > 0,05 dan nilai thitung 0,287 < ttabel 1,97410. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa H4 ditolak.

Inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan ketika harga barang naik atau turun secara terus menerus, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan yang artinya ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa, meskipun pendapatan mereka berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa sehingga hal ini tidak berakibat pada pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Artinya, berapapun besar kecilnya inflasi tidak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai pendapatan asli daerah (Oktiani, 2021).

Hubungan ini tidak selaras dengan teori *stakeholder*, dimana pihak-pihak berkepentingan memiliki peran penting dalam kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter, sementara pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Perusahaan juga memiliki peran dengan mengatur harga produk mereka, dan masyarakat umum mempengaruhi permintaan dan penawaran melalui keputusan konsumsi dan investasi mereka. Mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi, sehingga pendapatan asli daerah dapat terjaga dan meningkat secara stabil.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2021), Oktiani (2021), serta Luh dkk. (2021) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji t pada variabel belanja daerah memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 3,839 > ttabel 1,97410. Hasil thitung bernilai positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka, dapat dikatakan bahwa H5 diterima.

Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan ketika pemerintah meningkatkan belanja daerah, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program yang mendukung perekonomian daerah. Peningkatan ini dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Rafsanjani dan Suharno, 2022). Dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan cara memberi proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Iman dkk., 2019). Dengan kata lain, Pemanfaatan belanja daerah yang efisien, efektif dan ekonomis sehingga meningkatkan kesejateraan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan pajak dan kontribusi lainnya dari masyarakat (Fiddah, 2017).

Hubungan ini selaras dengan teori *stakeholder*, dimana pihak-pihak berkepentingan memiliki peran penting dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, suatu organisasi pemerintahan memberikan fasilitas umum untuk bisa dimanfaatkan oleh *stakeholder*nya. Dalam mewujudkan kesejahteraan, suatu organisasi pemerintahan membutuhkan peran *stakeholder* untuk bisa menggunakan jasa publik yang hasilnya dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, belanja daerah digunakan organisasi pemerintahan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum untuk bisa dinikmati oleh para *stakeholder*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman dkk. (2019), Fiddah (2017), serta Rafsanjani dan Suharno (2022) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya *gross regional domestic product*, maka akan mempengaruhi tingginya pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Laba BUMD tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya laba BUMD, maka akan mempengaruhi tingginya pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja daerah, maka akan mempengaruhi tingginya pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Variabel *gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, seperti industri, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, perlu adanya investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ekonomi dan sistem perpajakan daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan dan diterjemahkan menjadi pendapatan asli daerah. Mungkin diperlukan penyesuaian dalam kebijakan pajak dan retribusi agar pertumbuhan ekonomi lebih berdampak pada pendapatan asli daerah.
3. Variabel laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah dan perusahaan perlu meningkatkan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menerapkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Berikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan akses pasar agar BUMD dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga dengan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Upaya untuk mengendalikan inflasi melalui pengawasan harga dan distribusi barang dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pendapatan asli daerah secara tidak langsung.
5. Variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah perlu mengoptimalkan belanja daerah dengan fokus pada program-program yang dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, seperti investasi dalam infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif akan memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah.
6. Bagi peneliti selanjutnya, upaya untuk mengembangkan penelitian yang lebih baik lagi, dengan menambahan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti pajak daerah, retribusi daerah, industri, perdagangan, pariwisata, investasi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan memasukkan semua variabel ini, penelitian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.